

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

a. Pengertian BMT

Menurut Hartono BMT bergerak dalam dua fungsi yakni baitul maal (lembaga sosial) dan baitul tamwil (lembaga bisnis) yang menggunakan prinsip bagi hasil. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam terutama dalam bidang keuangan.¹²

Baitul Maal Wat at Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.¹³

¹² Hartono Widodo, PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah) Panduan Praktis Operasional BMT, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 81.

¹³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 45

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) tersusun atas dua kata golongan yang masing-masing mempunyai makna sendiri, yakni *Baitul Maal* dan *Baituttamwil*. *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Sedangkan *baituttamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.¹⁴

Menurut UU No.20 tahun 2008 Usaha Mikro Kecil adalah usaha produktif milik orang/perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undangundang ini. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.¹⁵

¹⁴ Ahmad Syifaal Anam, *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012), hlm. 37-38

¹⁵ Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.

b. Asas dan prinsip BMT

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Prinsip dasar BMT yaitu:

- 1) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *Thayyiban* (terindah), *Ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- 2) Barokah, artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah)
- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 5) Keadilan social dan kesetaraan jender, non-diskriminatif.
- 6) Ramah lingkungan.
- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- 8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat local.

c. Fungsi BMT

Fungsi BMT di masyarakat adalah untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih professional, salam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh

dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan hidup.

- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan social masyarakat banyak.

d. Pendiri BMT

BMT dapat didirikan oleh:

- 1) Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- 2) Satu pendiri dengan yang lainnya tidak memiliki hubungan keluarga.
- 3) Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal disekitar daerah kerja BMT.
- 4) Pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika disepakati oleh rapat para pendiri.

e. Permodalan BMT

Modal BMT, terdiri dari:

- 1) Simpanan pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota.

- 2) Simpanan pokok khusus (SPK) yaitu simpanan pokok yang khusus diperuntukkan untuk mendapatkan sejumlah modal awal, sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota pendiri.¹⁶

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga.

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor 12 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Dasar Hukum Pembiayaan

Ketentuan hukum syariah dalam kegiatan ekonomi terkait erat dengan adanya larangan riba dan melakukan transaksi dengan cara yang bathil, di dalam Al Qur'an dan hadits, berikut merupakan

¹⁶ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 46-47

surah Al Qur'an yang menjelaskan larangan riba dan larangan melakukan transaksi dengan cara yang bathil adalah sebagai berikut:

Surah Ali Imran Ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.¹⁷

Surah Al Baqarah ayat 275:

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوَ لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوِ وَاَحَلَّ
اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat); “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹⁸

¹⁷ Al Qur'an dan Terjemahan: Surah Ali Imron 130

¹⁸ Al Qur'an dan Terjemahan Surah Al Baqarah ayat 275

c. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan, yaitu:

- 1) *Profitability* yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum berfungsi untuk:

- 1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang)

tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkahkan stabilitas diarahkan pada usaha-usaha:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitas prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembagunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.

6) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus menerus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Disamping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan sewa sembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

e. Jenis-jenis Pembiayaan

- 1) Pembiayaan modal kerja syariah
- 2) Pembiayaan investasi syariah
- 3) Pembiayaan konsumtif syariah

- 4) Pembiayaan *sindikasi*
 - 5) Pembiayaan berdasarkan *take over*
 - 6) Pembiayaan *letter of credit*.
- f. Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan
- 1) Tujuan analisis pembiayaan
 - a) Menilai kelayakan usaha calon pemimjam
 - b) Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
 - c) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
 - 2) Prinsip analisis pembiayaan
 - a) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh dengan langkah sebagai berikut:
 - (1) Meneliti riwayat hidup calon *customer*
 - (2) Meneliti reputasi calon *customer*
 - (3) Meminta *bank to bank information*
 - (4) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada
 - (5) Mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi

(6) Mencari informasi apakah calon *customer* memiliki hobi berfoya-foya.

b) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran dapat dilakukan dengan:

(1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

(2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus.

(3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.

(4) Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauhmana kemampuan dan keterampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

- (5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi.
- c) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.
- d) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi, meliputi:
- (1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang digunakan
 - (2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.
- e) *Condition of economy* artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:
- (1) Keadaan konjungtur
 - (2) Peraturan-peraturan pemerintah
 - (3) Situasi, politik, dan perekonomian dunia
 - (4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran
- f) *Constrain* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

- 3) Prosedur analisis pembiayaan
 - a) Berkas dan pencatatan
 - b) Data pokok dan analisis pendahuluan
 - (1) Realisasi pembelian, produksi, dan penjualan
 - (2) Rencana pembelian, produksi, dan penjualan
 - (3) Jaminan
 - (4) Laporan keuangan
 - (5) Data kualitatif dari calon debitur
 - c) Penelitian data
 - d) Penelitian atas realisasi usaha
 - e) Penelitian atas rencana usaha
 - f) Penelitian dan penilaian barang jaminan
 - g) Laporan keuangan dan penelitiannya.
- 4) Aspek-aspek analisis pembiayaan
 - a) Aspek yuridis
 - b) Aspek pemasaran
 - c) Aspek manajemen dan organisasi
 - d) Aspek teknis
 - e) Aspek keuangan
 - f) Aspek jaminan
- 5) Aspek-aspek pertimbangan pemberian pembiayaan
 - a) Surat permohonan pembiayaan

Dalam surat ini berisi jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit/plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Disamping itu, surat diatas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, surat keputusan menteri, perijinan-perijinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

b) Proses evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. Proses penilaian meliputi:

- (1) Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap
- (2) Proses penilaian.¹⁹

3. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2002:180), Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek

¹⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal 1-5

ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.²⁰

Menurut James R Davis, C Wayne Alderman, & Leonard A Robinson (sesuai dengan SAS No. 55), Pengendalian Internal adalah seluruh kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang masuk akal agar tujuan organisasi (Entity) dapat tercapai.²¹

Pengendalian internal merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu, yang diharapkan dapat memajemen keuangan dengan baik. Dengan memaksimalkan sistem pengendalian internal terhadap bidang adminitrasi dan penyaluran pembiayaan sesuai prosedur pemberian pembiayaan yang telah dijelaskan oleh Muhammad bahwa proses pemberian pembiayaan meliputi surat permohonan pembiayaan dan proses evaluasi.²²

Sistem pengendalian intern terdiri dari sistem organisasi, mekanisme serta batasan-batasan pengaturan untuk menjaga kekayaan organisasi, mencocokkan ketelitian dan keunggulan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendesak untuk dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.²³

²⁰ Mulyadi. 2002. Auditing 1. Edisi ke 6. Jakarta: Salemba Empat. Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

²¹ Dewan Standar Auditing dari American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) pada bulan April 1988

²² Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hal. 209.

²³ Mulyadi, *Sistem Akuntansi (Edisi III)*, (Yogyakarta: BP STIE YYKPN Yogyakarta, 1997), hal. 165

Organisasi COSO pada tahun 1992 mengeluarkan hasil sebuah studi untuk menghasilkan definisi pengendalian intern, yang dikenal dengan model pengendalian intern (*Internal Control Model*). Produk COSO ini segera diterima secara luas sebagai otoritas pengendalian intern oleh manajemen, akuntan, auditor dan para pemakai laporan keuangan.

b. Tujuan dan Fungsi Sistem Pengendalian Internal

Penerapan sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi memiliki beberapa tujuan, ya itu: (a) Menjaga kekayaan catatan perusahaan, harta kekayaan perusahaan merupakan sarana untuk keberhasilan perusahaan untuk itu perlu dilindungi dengan pengawasan yang memadai agar tidak sesat atau hilang dari usaha penyalahgunaan dan usaha pencurian; (b) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, manajemen hendaknya memiliki informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan kegiatannya dan pengambilan keputusan; (c) Mendorong efisiensi dan operasional perusahaan, pengendalian dalam suatu perusahaan merupakan untuk mencegah pekerjaan yang tidak perlu, serta (d) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, setiap pengendalian internal diharapkan dapat memberikan jaminan

yang layak agar peraturan dan prosedur ditaati untuk mencapai tujuan perusahaan.²⁴

c. Komponen Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern berhubungan dengan kegiatan kerja suatu organisasi dan latar belakang bisnis yang berpedoman. Bila Pengendalian intern menyatu dengan infastruktur maka akan sangat efektif dan memiliki bagian penting dalam suatu organisasi perusahaan. Pengendalian intern yang efektif akan dapat memajukan peningkatan kualitas dan inisiatif, menjauhkan biaya yang tidak penting dan menciptakan respon yang cepat terhadap perubahan keadaan.

Lima komponen dalam model pengendalian COSO antara lain:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian dalam perusahaan akan menlikupi seluruh sikap manajemen dan karyawan mengenai pentingnya suatu pengendalian. Lingkungan pengendalian yang lemah akan diikutinya dengan kelemahan dalam komponen pengendalian internal yang lain. Lingkungan pengendalian merupakan komponen

²⁴ Abdul Halim, Auditing, Edisi ke-2, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2001), hal. 191.

pengendalian yang pertama, meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

a) Teori manajemen dan gaya operasi

Manajer harus mengambil tindakan aktif untuk menjadi contoh berperilaku etis dengan bertindak sesuai dengan kode etik personal. Manajer juga harus menekankan pentingnya pengendalian internal.

b) Kewajiban terhadap integritas dan nilai-nilai etika

Penting bagi manajemen untuk menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perilaku etis dan tidak etis manajer dan karyawan berdampak besar terhadap keseluruhan pengendalian internal. Perilaku etis dan tidak etis ini akan menciptakan suasana yang dapat mempengaruhi validitas proses pelaporan keuangan.

c) Kewajiban terhadap kompetensi

Penting bagi bagian personalia untuk mengisi lowongan kerja dengan personil yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan yang harus dikerjakan.

d) Komite Audit dan Dewan Direksi

Dewan direksi bertanggung jawab untuk memilih komite audit yang beranggotakan orang-orang dari

luar perusahaan. Peran komite audit adalah memantau akuntansi perusahaan serta praktik dan kebijakan pelaporan keuangan. Komite audit juga berperan sebagai perantara antara auditor internal dan auditor eksternal.

e) Struktur organisasi

Struktur organisasi perusahaan menggambarkan pembagian otoritas dan tanggung jawab dalam perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi ini harus disajikan secara eksplisit dalam bentuk grafis agar jelas siapa bertanggung jawab atas apa.

f) Penetapan otoritas dan tanggung jawab

Otoritas adalah suatu kekuasaan yang dimiliki seseorang tertentu yang memberikan amanat untuk bawahannya agar tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan tanggung jawab adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan seseorang yang telah diamanati oleh orang lain dengan berbagai tugas-tugas yang ada.

g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Yaitu sebuah kegiatan yang ada pada perusahaan tertentu yang menyangkut berbagai aktivitas

karyawan yang dilakukan dalam perusahaan tersebut, mulai dari bagaimana karyawan sebelum menjadi karyawan hingga mengapa karyawan tersebut harus diberhentikan.

2) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian yang tberhubungan dengan laporan keuangan meliputi:

a) Desain dokumen yang baik dan bernomorurut cetak

Adalah sebuah gambaran dokumen yang simpel sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pengisian. Tersedianya tempat tanda tangan bagi mereka yang membutuhkan sangat diperlukan dalam hal ini. Dan dokumen juga perlu adanya nomorurut cetak untuk memudahkan pencarian dokumen dan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

b) Pemisahan tugas

Dalam suatu kegiatan yang ada dalam disebuah perusahaan perlu adanya kejujuran untuk setiap karyawannya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya penyelewengan harta atau aset suatu perusahaan tersebut, maka dengan ini perusahaan harus dapat memisahkan suatu pekerjaan ataupun tugas, yang mana karyawan

tersebut dapat dengan mudahnya melakukan penyelewengan.

c) Otorisasi yang memadai atas setiap transaksi bisnis

Suatu kebebasan yang diberikan atasan untuk bawahannya sebuah perusahaan untuk dapat melakukan suatu kegiatan ataupun keputusan tertentu.

d) Mengamankan harta dan catatan perusahaan

Harta suatu perusahaan merupakan aset tersebut yang dimiliki oleh perusahaan maka harus adanya sebuah sistem pengawasan yang terbaik untuk mengamankan harta perusahaan tersebut.

e) Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan lain

Dalam hal ini akan membandingkan catatan dengan wujud yang sebenarnya.

3) Penaksiran Risiko

Organisasi harus menyadari dan waspada terhadap berbagai resiko yang dihadapinya. Organisasi harus pula menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola resiko-resiko terkait.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi harus diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik.

5) Pengawasan Kinerja

Kegiatan dalam pengawasan kinerja diantaranya, supervisi yang efektif, akuntansi pertanggungjawaban dan pengauditan internal.²⁵

d. Elemen-elemen Pengendalian

Menurut Siswanto dalam sistem pengendalian internal ada empat elemen pokok yang saling berhubungan. Elemen pokok pengendalian tersebut, yaitu (a) Kondisi atau karakteristik yang dikendalikan; (b) Instrument atau metode sensor untuk mengukur kondisi atau karakteristik yang dikendalikan; (c) Kelompok, unit atau instrument kendali yang dibandingkan data yang diukur dengan pekerjaan yang direncanakan dan mengarahkan mekanisme perbaikan untuk memenuhi kebutuhan, serta (4) Kelompok atau mekanisme yang bergerak dan mampu mengadakan inovasi dalam sistem operasi.²⁶

²⁵Ummu Almaas Khoirunnisaa, Hendrik Manossoh, dll, "*Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah Pada Bri Syariah Kc Manado*", Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 498-508

²⁶ H.B Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2005), hal. 142

e. Karakteristik Pengendalian yang Efektif

Pengendalian yang efektif berarti pengendalian yang tepat sesuai dengan proses yang harus dilalui tanpa penyimpangan dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar. Secara umum pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) Akurat (Accurate), (b) Tepat waktu (Timely), (c) Objektif dan Komprehensif (Objective and Comprehensible), (d) Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (Focussed on Strategic Control Points), (e) Secara Ekonomi Realistic (Economically Realistic), (f) Secara Organisasi Realistic (Organizationally Realistic), (g) Dikondisikan dengan arus pekerjaan organisasi (Coordinated With the Organization's Work Flow), (h) Fleksibel (Flexible), (Preskriptif dan operasional (Prescriptive and Operational), dan (i) Diterima para anggota organisasi (Accepted by Organization Members).²⁷

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisaa, Manossoh, dan Afandi²⁸, memiliki tujuan sebagai pengendalian dan pengatur terhadap pembiayaan yang diberikan guna memantau dan mengawasi pembiayaan tersebut sehingga aset suatu perusahaan dapat terlindungi. Dalam

²⁷ Ibid., hal. 149.

²⁸ Ummu Almaas Khoirunnisaa, Hendrik Manossoh, dll, "*ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BRI SYARIAH KC MANADO*", Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 498-508

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu Pengendalian internal yang diterapkan untuk pembiayaan murabahah di BRI Syariah KC Manado meliputi aturan yang ditetapkan oleh manajemen, struktur organisasi, formulir dan dokumen yang digunakan dalam pembiayaan murabahah, pencatatan transaksi pembiayaan yang sah, serta pengawasan terhadap pembiayaan. Pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah pada BRI Syariah KC Manado sudah berjalan dengan cukup baik. Namun dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan pengendalian internal. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah masih adanya karyawan yang melakukan rangkap kerja atau merangkap dua bagian, sehingga dapat memungkinkan akan terjadinya kesalahan dalam suatu pekerjaannya. Sedangkan persamaannya terletak pada tujuan pengendalian internal dan komponen pengendalian intern.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putriandini, dan Irianto²⁹, memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan pengaturan dan pengawasan di Bank Syariah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini yaitu Sistem Pengendalian Internal pembiayaan musyarakah yang diteliti tercermin pada alur proses standar pembiayaan

²⁹ Silvana Putriandini, dan Gugus Irianto, "*FENOMENOLOGI KONVENSIONAL DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH*", Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol 3 No.1,2012, Hal. 1-160

musyarakah yang mengandung lima tahapan. Lima tahapan inilah yang diteliti oleh peneliti. Berdasarkan lima tahapan tersebut, peneliti mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap tahapan tersebut. Kemudian peneliti memadukan nilai-nilai tersebut dan menggolongkannya menjadi nilai-nilai konvensional dan nilai-nilai syariah, selanjutnya peneliti mengungkap penyebab melekatnya nilai-nilai konvensional tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penggolongan nilai pada setiap proses pembiayaan antara nilai syariah maupun nilai konvensional. Persamaan terletak pada alur proses dalam pembiayaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Salim³⁰, memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam mendukung pengendalian internal kredit. Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa data sekunder mengenai sejarah perusahaan, sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern pemberian kredit. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemberian kredit pada PT. Bank Bukopin Manado, nasabah harus mengisi formulir permohonan kredit kemudian oleh pihak bank akan dilakukan analisis berupa interview, verifikasi dan appraisal sebelum mengambil keputusan mengenai pemberian kredit. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada syariah atau tidaknya dalam setiap

³⁰ Faradila A. Salim, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Bukopin Manado”, Jurnal EMBA, Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 1034-1043

transaksi. Sedangkan persamaan terletak pada metode yang digunakan, dimana dalam dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Masyithoh³¹, memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui status badan hukum dan pengawasan pada BMT sebelum dan sesudah adanya Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status badan hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Dimana apabila mengembangkan usaha melebihi satu kabupaten/kota, maka harus bertransformasi menjadi bank dan berstatus badan hukum perseroan terbatas. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah data yang digunakan dalam lingkup Jawa Tengah. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada peraturan yang harus dijalankan oleh BMT saat ini berdasarkan Undang-undang tersebut.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiya, dan Heykal³², memiliki tujuan penelitian untuk mengevaluasi seluruh kegiatan pengendalian internal atas pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon

³¹ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan BMT", Jurnal Conomica, Vol V Edisi 2 Oktober 2014, Hal. 32-33

³² Evi Alfiya dan Mohammad Heykal, "Analisa Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon JeruK", Jurnal Binus Business Review, Vol 5 No. 1 Mei 2014, Hal. 207-208

Jeruk. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan explanatory, yaitu metode yang bertujuan untuk memahami, merumuskan dan menjelaskan masalah-masalah penelitian, penyusunan teoritis, serta pengembangan dan alternatif solusi yang dapat dilakukan. Hasil dari penelitian ini yaitu kegiatan yang ada di Bank tersebut telah sesuai dengan prosedur akan tetapi ada peneliti menemukan beberapa kondisi yang tidak mendukung pencapaian pengendalian internal. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah adanya resiko yang dimiliki pada penelitian di Bank ini. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode data yang digunakan.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini membahas mengenai analisis sistem pengendalian intern terhadap persetujuan pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Cabang Gondang Tulungagung, adapun skema dari kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

